

**DAMPAK KEBIJAKAN GERNAS KAKAO
TERHADAP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
DI KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN MAMASA
(Studi Kasus pada Tiga Tipologi Kelompok Tani)**

***IMPACT OF “GERNAS KAKAO” POLICY
ON INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FARMERS GROUP IN MESSAWA SUB
-DISTRICT MAMASA DISTRICT
(A Case Study On Three Typology Of Farmers Group)***

BARTHOLOMIUS



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI SISTEM-SISTEM PERTANIAN
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

**DAMPAK KEBIJAKAN GERNAS KAKAO
TERHADAP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
DI KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN MAMASA
(Studi Kasus pada Tiga Tipologi Kelompok Tani)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Sistem-Sistem Pertanian

Disusun dan Diajukan Oleh

BARTHOLOMIUS

(P0108211506)

Kepada

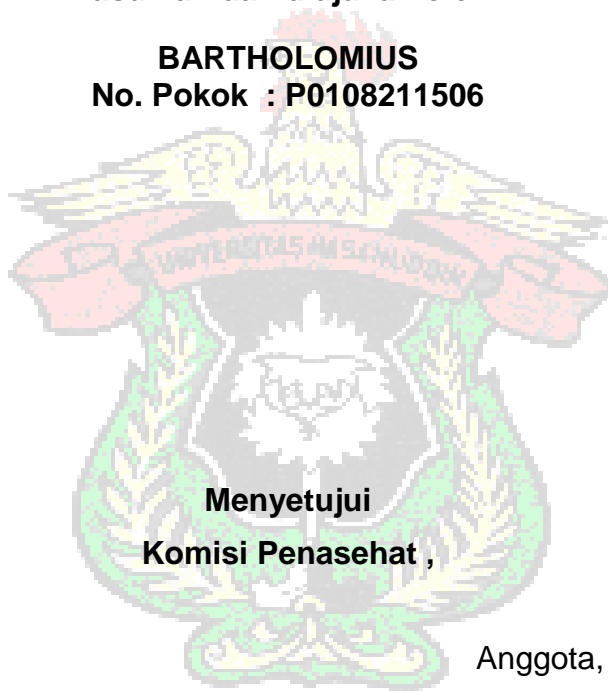
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DAMPAK KEBIJAKAN GERNAS KAKAO
TERHADAP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI
DI KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN MAMASA
(Studi Kasus pada Tiga Tipologi Kelompok Tani)**

Diusulkan dan diajukan oleh :

BARTHOLOMIUS
No. Pokok : P0108211506



**Menyetujui
Komisi Penasehat ,**

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS

Dr. Muhammad Arsyad, SP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BARTHOLOMIUS

Nomor Pokok Mahasiswa : P0108211506

Program Studi : Sistem-Sistem Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2013

Yang menyatakan

BARTHOLOMIUS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ilahi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pimpinannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :

DAMPAK KEBIJAKAN GERNAS KAKAO TERHADAP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN MAMASA.

Kajian pengaruh kebijakan Program Gernas Kakao terhadap kelembagaan kelompok tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa menjadi hal yang menarik untuk memperoleh gambaran tentang dampak pelaksanaan sebuah kebijakan. Jika kebijakan ini mampu berperan terhadap perbaikan kelembagaan petani maka akan berdampak positif dalam penataan infrastruktur pertanian secara keseluruhan. Ini berarti ada dampak lain dari pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao terhadap kelembagaan petani dalam sistem organisasi dan tata kelolanya yang pada gilirannya berdampak pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian di masa yang akan datang dengan menjadikan pembinaan kelembagaan petani sebagai bahagian penting dalam penyusunan kegiatan.

Kesadaran akan banyaknya kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penulis menyusun tesis ini membawa ingatan akan besarnya peran dan bantuan dari berbagai pihak hingga tesis ini dapat diselesaikan. Jika sekiranya mungkin penulis terbuka untuk menerima kritik dan masukan konstruktif dalam perbaikan karya tulis berikutnya.

Dari hati yang dalam dan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS., sebagai ketua komisi penasehat dan Bapak Dr. Muhammad Arsyad, SP, M.Si, sebagai anggota komisi penasehat yang senantiasa meluangkan waktu dan penuh ketekunan memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
2. Ir. Mambu', MT Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Horti Kultura Kab. Mamasa, Simon DP., SP mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Horti Kultura Kab. Mamasa dan Petugas Setker Gernas Kakao Kabupaten Mamasa
3. Para Dosen pada Program Pascasarjana yang telah membekali pengetahuan dan nilai-nilai keilmuan kepada penulis.
4. Pak Yusuf dan Staf Pegawai pada Jurusan Sosek UNHAS yang banyak membantu penulis selama kuliah.

5. Teman seperjuangan Papa Vanesa, Papa Audi, , Mama Yospin Jhoni Siagian dan rekan-rekan seangkatan terima kasih atas kebersamaan selama ini jadi motivasi dalam setiap perkuliahan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak ternilai dari penulis untuk keluargaku; Istri terkasih Veronika TM, SKM, kedua pangeranku yang hebat Glen Franklyn Kadang dan Stev Hardlyand Kadang, orang tua terkasih Papa dan Mama dan Mertua Nekpa n Nekma, kakak dan adik serta semua kemanakan yang selalu sabar dan tabah mendukung dan mendoakan penulis hingga menjadi motivasi dalam penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Kiranya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi pemerhati kelembagaan petani dan pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Mamasa, Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

BARTHOLOMIUS. *Dampak Kebijakan Gernas Kakao Terhadap Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa (dibimbing oleh Sitti Bulkis dan Muhammad Arsyad).*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak Program Gernas Kakao terhadap pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dengan proses observasi dan wawancara untuk mengkaji Implementasi Gernas Kakao dan analisis RON terhadap dampak pelaksanaan Program Gernas Kakao dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok tani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Gernas Kakao pada Kelompok Tani di Kecamatan Messawa pada Kegiatan Peremajaan, Pemberdayaan Petani, Penyaluran Dana bantuan Upah Kerja dan Sarana Produksi terlaksana dan diterima kelompok tani, namun Pendampingan TKP-PLP-TKP belum terlaksana sesuai petunjuk teknis. Hasil Analisis R-O-N menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan Gernas Kakao terhadap pengembangan kelembagaan kelompok tani adalah; dari segi *resources* (sumberdaya) kelompok tanipeserta Gernas Kakao mengalami perkembangan pada potensi lahannya demikian juga pada peningkatan kemampuan kelompok tentang teknis budidaya kakao, namun akses informasi dan teknologi masih sangat terbatas. Dari segi *Organisation* (Organisasi), kegiatan Pemberdayaan Petani berperan dalam penyadaran berkelompok dan fungsi setiap pengurus kelompok tani. Identifikasi pada *Norm* (norma) menunjukkan bahwa program Gernas Kakao berdampak terhadap pembentukan nilai dan prinsip otonomi individu dalam kehidupan kelompok tani.

Kata Kunci; Gernas Kakao, Kelompok Tani, Dampak dan Penguatan Kelembagaan

ABSTRACT

BARTHOLOMIUS. Impact of “Gernas Kakao” Policy On Institutional Development Farmers Group In Messawa District, Mamasa Regency (supervised by Sitti Bulkis and Muhammad Arsyad).

The aim of the research is to analyze the implementation and the impact of “Gernas Kakao” program on the development of the strengthening of farmers group institution in Messawa District, Mamasa Regency.

The research used descriptive qualitative study. The methods of obtaining the data were observation and interview. The data were analyzed used RON on the impact of the implementation of “Gernas Kakao” Program in the development of the strengthening of farmers group institution.

The result of research indicate that the implementation of “Gernas Kakao” Program in Messawa District at regeneration activity, farmer empowerment, fund distribution of work wage, and production facilities is done and accepted by farmer group, however assistance "TKP-PLP-TKP" has not done as directed technical. The result of RON analysis indicated that the impact of the implementation of Gernas Kakao on the development of farmer group institution is that viewed from resources the participants of Gernas Kakao is developing of its land potency. Similarly, farmers' ability on the techniques of cocoa farmer enterprise is improving, but information access and technology are still very limited. Viewed from organization, farmer empowerment activity has a role on the awareness of grouping and awareness of function of each board member of farmer group. Norm identification indicates that the program of Gernas Kakao have an impact on the formation of values and principle of individual autonomy in farmer's group life.

Key words : Gernas Cocoa, Institutional Farmers Group, Impact and Strengthening of Institution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Konsep Operasional	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kelembagaan Kelompok Tani dan Strategi Pengembangan	10
B. Falsafah Kebijakan	22
C. Program Gernas Kakao	24
D. Tanaman Kakao	42
E. Kerangka Pikir	45

BABA III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	50
B. Waktu dan Tempat Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Informan Penelitian	53
F. Editing dan Tabulasi Data	55
G. Analisis Data	55

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Kondisi Usahatani Kakao	58
C. Kelembagaan Petani Kakao	61
D. Implementasi Program Gernas Kakao pada Kelompok Tani Di Kecamatan Messawa Kab. Mamasa	65
E. Dampak Pelaksanaan Program Gernas Kakao Terhadap Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Di Kec. Messawa	79

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

No		Hal
1.	Tabel 1. Luas Lahan dan Lokasi Penyebaran Gernas Kakao 2010 ...	28
2.	Tabel 2. Jenis Tanaman perkebunan dan Luas Lahan (Ha) di Kecamatan Messawa tahun 2012	59
3.	Tabel 3. Kondisi Kelompok Tani Eran Batu , Sumule dan Buttu Lima Sebelum Pelaksanaan Gernas Kakao	65
4.	Tabel 4. Frekuensi Keikutsertaan Kelompok Tani dalam Kegiatan Pemberdayaan Petani Peserta Gernas Kakao di Kec. Messawa.....	71
5.	Tabel 5. Perbandingan Penerimaan Bantuan Bibit SE, Pupuk dan Handsprayer pada Kelompok Tani.....	83
6.	Tabel 6. Besarnya Dana Upah Kerja yang Diterima Kelompok Sejak Tahun Anggaran 2010 sampai Tahun Anggaran 2012.....	88
7.	Tabel 7. Perkembangan Modal (Dana) Kelompok Tani Peserta Gernas di Kec. Messawa.....	91
8.	Tabel 8. Perbandingan Tingkat Pendidikan Anggota Kelompok Tani Eran Batu, Sumule dan Buttu Lima.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

No	Hal
1. Kuisisioner dan Pedoman Wawancara	121
2. Peta Wilayah Kecamatan Messawa	132
3. Daftar Perkembangan Kelompok Tani dan Gapoktan di Kecamatan Messawa Sebelum dan Sesudah Gernas Kakao.....	133
4. Daftar Rekapitulasi Kelompok Tani dan Petani Peserta Gernas Kakao Tahun Anggaran 2010.....	134
5. Photo Pelaksanaan Kegiatan Gernas Kakao dan Penelitian.....	136

DAFTAR GAMBAR

No	Hal
1. Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir Penelitian	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya (Indrawanto, 2009). Kebijakan pemerintah dalam sebuah program senantiasa memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti dalam bidang pertanian, setiap sektor diarahkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi petani di lapangan. Program pemerintah dalam pembangunan pertanian saat ini diarahkan pada pengendalian masalah di sektor pertanian/perkebunan yang sasaran utamanya adalah peningkatan produksi dan mutu pertanian/perkebunan. Dengan konsep ini diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup petani, memperluas lapangan pekerjaan serta perbaikan konsep kelembagaan petani itu sendiri.

Salah satu komoditi perkebunan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan, karena dilihat dari peran ekonomi ke depan dan ke belakangnya cukup besar adalah Kakao. Ke belakang sebagai lapangan kerja bagi rumah tangga petani, buruh tani, dan penggunaan input pertanian. Ke depan memberikan kesempatan kerja dan berusaha di sektor, transportasi,

industri makanan, rumah makan/restoran, dan industri minuman. Oleh karena itu pengusaha perkebunan kakao tidak saja mampu menampung kesempatan kerja juga menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat perdesaan dan perkotaan yang terkait dalam masyarakat kakao.

Upaya Pemerintah untuk menggenjot produksi kakao nasional sebesar 1,07 juta ton dilakukan dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) di 25 provinsi. Gernas Kakao dilakukan pada 3 kegiatan utama yaitu Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi. Dalam program ini juga dilakukan pembinaan pada kelembagaan petani dan pemberdayaan petani itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan kegiatan Gernas Kakao ini akan mengarah pada peningkatan produksi dan mutu kakao serta peningkatan kapasitas dan efektifitas kelembagaan di tingkat petani (Anonim 2009).

Di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa merupakan salah satu penghasil Kakao dengan produksi 17.181,99 ton per tahun. tanaman ini dijadikan salah satu komoditi favorit setelah tanaman kopi. Bahkan sebahagian petani beralih menjadi petani kakao karena budidayanya lebih mudah. Luas areal tanaman kakao di Kabupaten Mamasa adalah 21.746 Ha. Dengan produktivitas rata-rata 576 kg/ha (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa 2012).

Kecamatan Messawa adalah salah satu kecamatan terluar di Kabupaten Mamasa dengan kondisi geografis alamnya yang merupakan pegunungan dengan ketinggian di atas 300-1750 m dari permukaan laut (Anonimus, 2012). Kecamatan ini menjadi penghasil kakao yang potensial di Kabupaten Mamasa. Tanaman kakao menjadi salah satu primadona petani di wilayah ini di samping usaha pertanian lainnya sebab pembudidayaannya relatif lebih mudah. Pola budidaya tanaman kakao oleh masyarakat di Kecamatan Messawa masih tradisional dan hanya sebahagian kecil yang melakukan teknis budidaya yang cukup baik dibanding petani lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya produktifitas dan mutu produk tanaman kakao mereka.

Luas pertanaman kakao di Kecamatan Messawa adalah 1.805 ha dengan total produksi 11.875 ton dari tanaman yang menghasilkan seluas 255 ha yang dikelola secara perseorangan oleh 1.750 orang petani. Produktivitasnya masih rendah yaitu 518 kg/ha. (Dintanbunhorti Kabupaten Mamasa, 2012). Masalah yang dihadapi petani kakao di Kecamatan Messawa adalah tingginya serangan hama dan penyakit tanaman, kurang optimalnya fungsi kelembagaan petani, dan rendahnya kualitas biji kakao.

Kondisi kehidupan masyarakat Messawa yang masih memegang budaya dan kearifan lokal yang ditinggalkan leluhurnya menjadi salah satu modal sosial. Budaya kerjasama dan etos kerja yang tinggi adalah potensi

yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dalam berusahatani. Dari segi kelembagaan petani masih sangat sederhana dan hanya beberapa yang bisa bertahan sejak dibentuknya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kapasitas petani itu sendiri yang belum memadai dan minimnya fasilitasi pemerintah khususnya pendampingan dan pengembangan oleh petugas lapangan atau penyuluh setempat. Adanya program Gernas Kakao diharapkan menjadi salah satu program yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan dan penguatan kelembagaan petani di daerah ini.

Dalam hal penguatan dan pengembangan kelembagaan, perlu dilakukan identifikasi pada tiga (3) komponen utama yaitu Sumber daya (*Resources*), Organisasi (*Organization*) dan Norma (*Norm*) yang biasa disingkat identifikasi R – O – N. Senada dengan Bulkis (2011), bahwa dalam hal penguatan kelembagaan perlu dilakukan identifikasi pada potensi, permasalahan dan kebutuhan sebuah lembaga serta identifikasi pada 3 komponen R – O – N (*Resources, Organization dan Norm*). dengan demikian kita bisa mengetahui komponen yang mesti diperbaiki dan disupor demi optimalisasi dan penguatan sebuah lembaga petani.

Bertitik tolak dari gambaran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dampak pelaksanaan gernas kakao terhadap pengembangan kelembagaan kelompok tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Topik ini menarik untuk diangkat ke permukaan sebab kelembagaan petani

memegang peran penting dalam implementasi program pemerintah di lapangan. Kelembagaan petani yang mantap akan memberikan dampak baik dalam pencapaian sasaran pembangunan di tingkat petani. Selain itu tugas pemerintah juga adalah memberikan pendampingan dan penguatan pada kelompok-kelompok tani dan gapoktan setelah kelembagaan ini dibentuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Gernas Kakao pada Kelompok Tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa?
2. Apa dampak kebijakan Gernas Kakao Terhadap Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yakni:

1. Menganalisis implementasi Kebijakan Gernas Kakao pada kelompok tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
2. Menganalisis dampak kebijakan Gernas Kakao terhadap penguatan kelembagaan Kelompok Tani di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yakni :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamasa dalam upaya peningkatan fungsi dan Peran kelembagaan petani untuk membantu dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.
2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pertanian yang menyangkut pelayanan publik dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik.
3. Dapat mendorong peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang dampak kebijakan pembangunan pertanian lainnya bagi kelembagaan petani.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi kalangan praktisi kelembagaan petani juga bagi petani dalam membentuk dan membangun kelembagaannya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional yang digunakan peneliti untuk memberikan pemahaman permasalahan sebagai berikut :

1. Petani kakao adalah petani yang menanam dan mengusahakan kakao di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa .

2. Gernas Kakao adalah sebuah Program Kebijakan peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dengan memberdayakan semua potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada khususnya di Kabupaten Mamasa dan teristimewa di Kecamatan Messawa yang terkena dampak serangan hama penyakit dari tingkat sedang sampai berat.
3. Kelompok tani adalah wadah yang terbentuk dari beberapa orang petani dalam satu desa untuk tujuan tertentu.
4. Kelembagaan adalah organisasi yang dibentuk oleh petani dengan norma dan nilai-nilai budaya yang ada dalam mendukung upaya peningkatan produksi, mutu kakao, pendapatan dan kesejahteraan petani pada program Gernas Kakao tahun 2010 di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
5. Penguatan kelembagaan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis melalui pendampingan dan pelatihan-pelatihan baik oleh pemerintah, swasta, LSM atau suatu lembaga secara swadaya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan mengelola dan mengembangkan kelompoknya menjadi lembaga yang mandiri.
6. Sumber daya adalah Potensi lahan, modal, SMD, akses Informasi dan Teknologi sebagai komponen yang diperlukan dalam menunjang terciptanya kelembagaan petani yang kuat dan maju.

7. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang dimiliki oleh petani secara khusus kemampuan intelektualnya yang dapat meningkatkan kapasitas kelompoknya.
8. Sumber Daya Alam adalah potensi lahan yang dimiliki oleh petani secara khusus Produksi Kakao yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan kapasitas kelompoknya.
9. Organisasi adalah perangkat kerja lembaga petani dalam mengorganisasikan sumber daya dan potensi yang ada untuk mencapai tujuan.
10. Anggaran Dasar adalah sebuah aturan pokok dalam organisasi kelompok tani yang mengatur semua aspek organisasi kelompok.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan dalam organisasi kelompok tani yang merupakan penjelasan secara rinci dari Anggaran Rumah Tangga
12. Norma adalah kaidah-kaidah atau nilai-nilai luhur yang menjadi suatu pengarah dan penuntun sekaligus menjadi kekuatan bagi suatu kelembagaan tani dalam mencapai target yang diinginkan.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur atau budaya luhur suatu daerah atau wilayah yang menjiwai sendi-sendi kehidupan masyarakatnya
14. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) adalah kumpulan beberapa kelompok tani dalam sebuah desa dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran lembaga petani dalam meningkatkan kehidupan anggotanya.

15. Pemberdayaan Petani adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani peserta Gernas Kakao di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa melalui pelatihan dan pendampingan dalam upaya peningkatan kualitas petani dalam mengelola usahatani.
16. Petugas pendamping adalah petugas yang dikontrak secara nasional yang mempunyai tugas mendampingi petani dan kelompok tani dengan fasilitas yang memadai dalam melakukan pembinaan kelembagaan petani peserta gernas di wilayah kecamatan yang ditentukan.
17. Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani peserta Gernas Kakao melalui metode ceramah, diskusi dan praktek lapangan dengan jangka waktu tertentu.
18. Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan sesuatu kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan.
19. Dampak adalah pengaruh pelaksanaan Gernas Kakao terhadap pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Kakao di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
20. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan program gernas kakao di lapangan.
21. Pengembangan kelembagaan Kelompok tani adalah upaya yang dilakukan demi meningkatkan dan memperkuat kelembagaan petani dalam melakukan kegiatan usahatani setiap anggotanya.

22. Penyuluhan adalah serangkaian proses pemberdayaan petani dan kelompok tani dalam rangka peningkatan kapasitasnya agar mampu mengadopsi teknologi guna mendukung pelaksanaan Gernas Kakao di Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
23. Kelompok Tani Maju adalah kelompok tani yang secara kelembagaan mampu memenuhi kebutuhan kelompoknya dalam berusahatani kakao.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelembagaan Kelompok Tani dan Strategi Pengembangan

1. Kelembagaan Kelompok Tani

Istilah kelembagaan (*institutional*) lebih sering digunakan untuk makna yang sama dengan “keorganisasian”. Pengembangan kelembagaan (*institutional development*) merupakan strategi utama yang selalu dipakai dalam program-program pembangunan pedesaan di dunia, termasuk seluruh departemen di Indonesia. Pengembangan kelembagaan perlu dilakukan baik di tingkat lokal maupun nasional. Istilah lokal merupakan kesatuan sosial ekonomi dan politik yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.

Terjadi silang pendapat di antara para ahli tentang konsep organisasi dan kelembagaan. Dan menurut Uphoff (1986), bahwa kelembagaan (*institution*) menekankan pada suatu kompleks nilai (*rule*) dan norma (*norm*) sedangkan organisasi (*organization*) merujuk pada jaringan peran (*role*). Jika keduanya dipadukan dalam batasan ini, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu institusi yang bukan organisasi, organisasi yang bukan institusi, serta institusi yang sekaligus organisasi. Sebuah organisasi yang belum menjadi sebuah lembaga hanya memiliki daftar susunan pengurus dengan perannya masing-masing. Sementara

sebuah lembaga dibungkus dalam suatu organisasi dengan nilai dan norma-norma serta perilaku berpola yang dianut, dimengerti dan dilakukan oleh semua komponen untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Bulkis (2010), kelembagaan mengarah pada adanya seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai kebutuhan penting dalam kehidupannya sedangkan organisasi fokusnya adalah struktur, struktur tersebut terbentuk sebagai hasil dari interaksi sejumlah peranan, interaksi tersebut bisa bersifat kompleks bisa pula bersifat sederhana, dapat berciri formal maupun informal. Dalam Pembangunan, Kelembagaan yang ideal adalah kelembagaan yang sekaligus lembaga dan organisasi. Lembaga dalam konteks “Pembangunan”, adalah organisasi formal menghasilkan suatu perubahan, melindungi berlangsungnya perubahan tersebut. Lembaga dalam hal ini berfungsi sebagai katalisator dan penghantar perubahan.

Terbentuknya suatu kelompok tani di suatu desa / nagori tertentu tidak serta merta kebutuhan kelompok dan permasalahan anggota kelompok tani dapat terselesaikan dengan mudah. Kelompok tani sebagai institusi/lembaga yang membawahi langsung pelaku pertanian di berbagai sektor komoditas produksi harus selalu senantiasa dihidup-hidupkan, dihimpun, dibina, dikuatkan dan diberdayakan agar proses transformasi pengetahuan dan teknologi dapat dengan mudah dilakukan kepada

anggota kelompok selain tentunya menjadi sarana anggota memecahkan kebutuhan dan permasalahan kelompok (Habib, 2009).

Kelompok tani berkembang menjadi gapoktan sedangkan kelompok kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kelompok tani berkembang menjadi asosiasi usaha. Disepakati pula bahwa wilayah kelompok tani sebaiknya identik dengan wilayah Pedukuhan/Dusun agar mudah dalam pengelolaan kegiatan, namun proses perubahan dari wilayah berdasarkan hampan ke domisili tidak dipaksakan agar tidak terjadi konflik horizontal di kalangan petani. Peran Penyuluh sebagai fasilitator penguatan kelembagaan petani harus diperkuat, dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas yang memadai sesuai tantangan kemajuan kelembagaan petani ke depan (BKPP Bantul, 2010).

Petani kecil jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani kecil secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpecah serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. Kelembagaan petani (Elizabeth, R., 2007) di desa umumnya tidak berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh :

- a. Kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau

program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok.

- b. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%).
- c. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
- d. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *sosial capital* setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.
- e. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.

- f. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang *top down*, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.
- g. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.
- h. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada sosial learning approach.
- i. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

2. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani Kakao

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa : kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewedahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah :

1. Prinsip otonomi (spesifik lokal).

Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :

a. Otonomi individu.

Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005). Kebebasan inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya

akan membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul (Syahyuti, 2007).

b. Otonomi desa (spesifik lokal).

Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal). Pedesaan di Indonesia, disamping bervariasi dalam kemajemukan sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dan beragam pula. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya.

Di samping itu, harus juga memperhatikann elemen-elemen tatanan yang hidup di desa, baik yang berupa elemen lunak (soft element) seperti manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya, maupun yang berupa elemen keras (hard element) seperti lingkungan alam dan sumberdayanya, merupakan identitas dinamis yang senantiasa menyesuaikan diri atau tumbuh dan berkembang (Syahyuti, 2007).

2. Prinsip pemberdayaan.

Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, *dkk*, 2003) yaitu :

- a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
- b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar, sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan , meliputi :

- a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.
- b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial.
- c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan.

Sejalan dengan pendapat Uphoff (1986), bahwa untuk pencapaian penguatan dan pengembangan kelembagaan diperlukan kerjasama

antara: administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global.

Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan (Elizabeth, 2007a) :

- a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (*voluntary sector*).
- b. Kelembagaan pasar (*private sector*) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
- c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan tersebut perlu mereformasikan diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan tranformasi kelembagaan sebagai upaya pemberdayaannya, yang dilakukan tidak hanya secara internal, namun juga tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut.

Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada :

- a). Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan,
- b). Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya,
- c). Win-win mutualy dengan kemitraan yang kolegal,
- d). Tercipta interdependensi hulu-hilir,
- e). Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani),
- f). Kooperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis,
- g). Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta
- h). Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007.b).

Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah : adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal (Saptana, *dkk*, 2003).

3. Prinsip kemandirian lokal.

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara desentralisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap

eksis dengan berbagai keragaman (diversity) yang dikandungnya (Amien, 2005).

Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan, karena dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional adalah dimana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggungjawab kelompok-kelompok komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit (Saptana, *dkk*, 2003).

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

Pada sisi lain Salman (2011), mengatakan bahwa strategi pengembangan lokal juga dapat ditempuh dengan pendekatan pengembangan kapasitas manusia pedesaan. Sebab jika kapasitas manusia pedesaan tinggi, maka lembaga yang melibatkannya juga akan efektif berfungsi. Pengembangan kapasitas manusia dapat dilakukan dengan pelatihan yang tepat dan pengembangan potensi kepemimpinan. Pelatihan untuk SDM lokal perlu terus diintensifkan dengan merekrut orang yang tepat pada bidang yang akan dikembangkan, dan dilakukan secara bervariasi untuk pengembangan berbagai lembaga, seperti pelatihan khusus untuk pemberdayaan wanita, pelatihan keorganisasian untuk pemimpin lokal, latihan khusus untuk paramedis, dan sebagainya. Metode pelatihan perlu menerapkan pendekatan yang lebih informal, proses belajar berlangsung horizontal, pengajar lebih berfungsi fasilitator untuk menanamkan kepercayaan diri yang lebih besar, pengarahan potensi diri, dan keberlanjutan inisiatif. Sasaran pelatihan yang diperlukan adalah meningkatkan kemampuan manusia pedesaan dalam mengenali dan memecahkan masalah mereka.

Sementara itu menurut Bulkis (2011), mengatakan bahwa penguatan kelembagaan petani kakao dilakukan dengan metode :

- a. Identifikasi Potensi, Masalah dan Kebutuhan Petani Kakao (Analisis R-O-N) Sebagai Upaya Penyadaran Kritis;

- b. Pengorganisasian dengan Pengembangan dan Penguatan kelembagaan (Kelompok-kelompok yang akan dijadikan wadah pengembangan).
- c. Penghantaran Sumberdaya sesuai yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan komoditas kakao.

B. Falsafah Kebijakan

Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung yang berupa berbagai macam bentuk dalam pengembangan dan peningkatan suatu program yang akan dilaksanakan. Program-program tersebut dituangkan dalam visi dan misi suatu lembaga atau institusi dalam mencapai kesuksesan terselenggaranya suatu program tersebut. Kebijakan suatu program kerja sangat menentukan jalannya atau terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai sasaran. Kebijakan sangat penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan tersebut memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai

kebijakan dapat meliputi 2 (dua) aspek: aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan kebijakan positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan Negara. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya (Indrawanto, 2009).

Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani, merupakan inti dari upaya pembangunan pertanian/pedesaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Peran Pemerintah adalah sebagai stimulator dan fasilitator, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat petani dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka visi pertanian memasuki abad 21 adalah pertanian modern, tangguh dan efisien. Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Hal ini akan dapat dicapai melalui pembangunan pertanian dengan strategi :

1. Optimasi pemanfaatan sumber daya domestik (lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi)
2. Perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumber daya, produksi dan konsumsi
3. Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis, dan
4. Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat secara berimbang (Anonim, 2009).

C. Program Gernas Kakao

Hasil identifikasi lapangan dan data tahun 2008, diketahui bahwa sebagian besar perkebunan kakao rakyat mengalami serangan hama dan penyakit, sehingga produksinya sangat rendah. Serangan hama penyakit utama adalah Penggerek Buah Kakao (PBK), Busuk Buah, Kanker Batang dan penyakit *Vascular Streak Dieback* (VSD), *Helopelthis* sp, mengakibatkan menurunnya produktivitas menjadi 570 kg/ha/tahun. Selain menurunkan produktivitas, serangan tersebut menyebabkan mutu kakao rakyat rendah, sehingga ekspor biji kakao ke Amerika Serikat mengalami pemotongan harga. Rendahnya mutu kakao menyebabkan citra kakao Indonesia menjadi kurang baik di pasar internasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Wakil Presiden RI pada pertemuan koordinasi tanggal 6 Agustus 2008 di Mamuju Sulawesi Barat telah menegaskan perlunya Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 Wakil Presiden Republik Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Pembaharuan Kakao di Indonesia. Gerakan ini diawali di Mamuju, Sulawesi Barat, yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi, Perbankan, Lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi. Program ini ditujukan untuk mempercepat upaya perbaikan budidaya tanaman kakao rakyat dalam upaya peningkatan produktifitas dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan dan melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada di 25 provinsi meliputi 98 kabupaten kota sentra kakao yang terkena serangan hama dan penyakit dengan kategori sedang sampai berat. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao direncanakan berlangsung selama 3 tahun yaitu dari 2009 – 2011.

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS) Kakao adalah upaya percepatan perbaikan budidaya tanaman kakao rakyat dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan/melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada di sentra kakao yang terkena serangan hama dan penyakit dengan kategori sedang sampai dengan berat (Dirjen Perkebunan, 2009).

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi :

a. Kegiatan Utama

- 1) Peremajaan tanaman seluas 400 Ha, dengan bibit berasal dari klon unggul hasil perbanyakan teknologi *Somatic Embryogenesis* (SE) yang kegiatannya meliputi penyediaan bibit, pembongkaran tanaman tua/rusak, penanaman pohon pelindung, pembuatan lubang tanam, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama/penyakit;
- 2) Rehabilitasi seluas 600 Ha, yang kegiatannya meliputi pemupukan, pemangkasan ringan, penyambungan dengan entres dari cabang plagiotrop tanaman kakao unggul, pemangkasan batang utama, sanitasi dan penanaman pohon pelindung.
- 3) Intensifikasi seluas 200 Ha, yang kegiatannya meliputi penyiangan gulma, pemangkasan pohon pelindung, pemangkasan tanaman pokok kakao, sanitasi kebun, pemupukan, pengendalian hama/penyakit dan panen sering;
- 4) Pemberdayaan petani sebanyak 2.795 orang yang kegiatannya meliputi pelatihan petani/pendampingan petani oleh tenaga pendamping dan Pelatihan Budidaya Tanaman Kakao sesuai

standar teknis dan Pelatihan Pasca Panen Kakao yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten;

- 5) Penerapan Standar Mutu yang kegiatannya meliputi penyediaan sarana sosialisasi standar mutu, sosialisasi standar mutu dan penyediaan sarana pasca panen.

b. Kegiatan Pendukung.

- 1) Tenaga Pendamping sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan 3 orang Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP);
- 2) Pengembangan sistem data base teknologi budidaya kakao, yang kegiatannya adalah pengambilan data base, merekapitulasi dan melaporkan;
- 3) Penyediaan sarana pendukung UPP;
- 4) Penyediaan sarana pendukung meliputi Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH);
- 5) Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

2. Waktu dan Lokasi gerakan

a. Waktu

Pelaksanaan Gerakan dimulai bulan Januari 2010 yang diawali dengan kegiatan identifikasi dan pendataan CPCL (calon petani

dan calon lahan). Dengan data CPCL yang masuk dari setiap kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran serta daerah yang belum mengikuti kegiatan gernas kakao tahun 2009. Kegiatan ini berakhir pada bulan Desember 2010.

b. Lokasi

Gerakan dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Messawa dan Kecamatan Bambang. Sebaran alokasi kegiatan dapat dilihat pada table 1 berikut :

Tabel 1. Luas Lahan (ha) dan lokasi Penyebaran Gernas Kakao 2010

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (ha)			
		Desa	Poktan	P	R	I	Jumlah
1	Messawa	5	21	73,50	51,50	75	200
2	Bambang	17	107	326,5	548,50	125	1.000
JUMLAH		22	128	400	600	200	1.200

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten. Mamasa 2010

3. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Peremajaan kebun kakao di 7 Kecamatan sesuai standar teknis;

- b. Terlaksananya Intensifikasi kebun kakao di 10 Kecamatan sesuai standar teknis;
- c. Meningkatnya mutu biji kakao sesuai standar mutu (SNI);
- d. Meningkatnya kemampuan 288 petani dalam mengelola kebun kakao sesuai standar teknis;
- e. Terlaksananya penyuluhan oleh tenaga pendamping;
- f. Beroperasinya 1 unit UPP (Unit Pelayanan Pembinaan) untuk melayani dan mendampingi petani di lokasi gerakan ;
- g. Beroperasinya 1 unit UPH (Unit Pengolahan Hasil) untuk pengolahan hasil produksi kakao petani;
- h. Tersedianya Data Base Kakao;
- i. Adanya rekomendasi hasil kajian dampak sosial pelaksanaan gerakan oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kakao nasional.

4. Kelompok Sasaran, Tata Cara Seleksi

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tatacara seleksi kelompok sasaran.

a. Petani / Pekebun

Persyaratan Calon Petani peserta Gerakan Nasional

Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah sebagai berikut :

- (1) Petani pemilik kebun kakao;

- (2) Berdomisili di lokasi gerakan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK);
- (3) Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah;
- (4) Anggota Kelompok Tani berdasarkan kelompok hamparan dan atau domisili
- (5) Tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran;
- (6) Jumlah anggota kelompok sasaran adalah 20 sampai dengan 35 orang petani.
- (7) Bersedia mengikuti ketentuan gerakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- (8) Ditetapkan sebagai peserta gerakan dengan surat keputusan Bupati/Walikota.

b. Kebun

Kebun kakao yang dapat diikuti sertakan dalam Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional adalah :

- (1) Kebun dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun) / rusak berat akibat terserang hama penyakit;
- (2) Kebun dengan tanaman yang umurnya masih produktif, tapi dalam kondisi rusak sedang karena serangan hama penyakit;

- (3) Kebun dengan tanaman dalam kondisi rusak ringan dan kurang terawat.
- (4) Luas pemilikan lahan maksimal 4 (empat) ha
- (5) Lahan harus dapat disertifikasi.

c. Penetapan Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran (Calon Petani/Calon Lahan) diseleksi oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa berdasarkan usulan dan permohonan dari setiap desa/kelurahan di setiap kecamatan produsen kakao. Daftar usulan dari kelompok-kelompok diseleksi dengan dasar rekomendasi (secara tertulis) oleh Petugas Pendamping/Teknis sesuai kriteria masing–masing ruang lingkup kegiatan (Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi) yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagai peserta kegiatan Gernas Kakao setiap tahun berjalan dalam masa program kegiatan.

5. Pendekatan Dan Pola Gerakan

a. Pendekatan Gerakan

Pendekatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah sebagai berikut :

- (1) Gerakan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, perbankan, petani, swasta dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada;
- (2) Lahan merupakan hamparan yang kompak atau berkelompok;
- (3) Pemberdayaan petani dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan;
- (4) Tanaman tua/rusak berat diremajakan dengan menggunakan klon unggul SE (*somatic embryogenesis*);
- (5) Tanaman produktif dengan kondisi rusak sedang dilakukan rehabilitasi dengan cara sambung samping menggunakan klon unggul;
- (6) Tanaman dengan kondisi kurang terpelihara dilakukan intensifikasi;
- (7) Bahan tanam (bibit dan entres), pupuk dasar untuk peremajaan, pupuk untuk rehabilitasi dan intensifikasi, serta sarana pendukung sebagian disediakan oleh Pemerintah;
- (8) Untuk petani yang mengikuti kegiatan peremajaan diberikan insentif benih tanaman sela (tanaman semusim);
- (9) Biaya tenaga kerja untuk pelaksanaan di kebun petani menjadi tanggungjawab petani/pekebun, kecuali tenaga kerja pembongkaran/penebangan dan penanaman untuk peremajaan, penebangan batang utama untuk rehabilitasi, sanitasi dan

pemangkasan untuk intensifikasi, sebagian ditanggung oleh pemerintah;

- (10) Biaya sarana produksi (pupuk, pestisida dan alat pertanian) untuk pemeliharaan tahap ke-2 dan seterusnya memanfaatkan fasilitas kredit Revitalisasi Perkebunan melalui perbankan;
- (11) Peserta Gerakan wajib mengelola kebun sesuai standar teknis dengan bimbingan dari pendamping/ penyuluh/fasilitator dan instansi pembina;
- (12) Petani peserta berdomisili di lokasi gerakan dan merupakan pemilik kebun.

b. Pola Gerakan

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan dengan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai dari pusat hingga daerah kabupaten kota.

(1) Pemerintah Pusat

- Menyediakan pembiayaan untuk pengembangan bahan tanam (benih) untuk peremajaan dan entres untuk sambung samping;
- Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan pupuk dasar pada kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi;

- Menyediakan pembiayaan sebagian bantuan upah tenaga kerja petani untuk pembongkaran/penebangan dan penanaman untuk peremajaan, penebangan batang utama untuk rrehabilitasi, sanitasi dan pemangkasan untuk intensifikasi;
- Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan alat dan bahan pengendalian OPT;
- Menyediakan pembiayaan tenaga pendamping dan sarana pendukung;
- Menyediakan sebagian pembiayaan untuk kegiatan pemberdayaan petani;
- Menyediakan pembiayaan pembangunan untuk operasional dan pengutuhan Substasiun Penelitian Kakao dan pemeliharaan kebun percontohan ;
- Menyediakan sebagian pembiayaan untuk perbaikan mutu / sosialisasi penerapan Standar Mutu;
- Menyediakan pembiayaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengawalan kegiatan Gerakan di 5 Kabupaten.

(2) Pemerintah Provinsi

Menyediakan anggaran APBD dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

- Pengadaan dan penyediaan sarana produksi dan pelayanan informasi;
- Penjamin/Avalis pinjaman petani terhadap perbankan;
- Penyediaan sebagian pembiayaan untuk pemberdayaan petani;
- Penyediaan biaya sertifikasi lahan kebun kakao;
- Menyediakan lahan untuk pembangunan sub stasiun penelitian.

(3) Pemerintah Kabupaten

Menyediakan anggaran APBD untuk mendukung Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang meliputi kegiatan;

- a. Sosialisasi, Penetapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) dan Pengawasan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan
- d. Pemberdayaan SDM Pertanian;

(4) Perbankan

Menyediakan fasilitas kredit Revitalisasi Perkebunan untuk pemeliharaan tahun kedua dan seterusnya (pupuk, pestisida, alat pertanian).

(5) Swasta/Assosiasi

Pelaksanaan sosialisasi penerapan standar mutu dan penyediaan sarana pasca panen;

(6) Petani

Menyediakan pohon pelindung dan tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan di kebunnya kecuali untuk pembongkaran dan penanaman pada kegiatan peremajaan, penebangan batang utama pada kegiatan rehabilitasi dan sanitasi serta sebagian pemeliharaan pada kegiatan intensifikasi.

6. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping diperlukan untuk mengawal pelaksanaan gerakan agar benar-benar sesuai dengan sasaran diharapkan. Petugas pendamping ini merupakan sarjana pertanian yang berasal dari Perguruan Tinggi setempat dengan sistem kontrak, sedangkan rekrutmennya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan dari masing-masing provinsi berpedoman kepada kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Tabel 2 berikut memuat daftar tenaga pendamping yang ditugaskan di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2. Rincian Tenaga Pendamping (TKP-PLP-TKP) di Provinsi Sulbar

No	Kabupaten	Nama Pendamping		
		TKP	PLP-TKP	Jumlah
1	Mamasa	Anwar, SP	1. Saparuddin 2. Muh Zain 3. Syahrullah	4 orang

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa 2010 setelah diolah

Pembantu Lapangan Tenaga Kontrak Pendamping adalah Tenaga Kontrak perkebunan (PLP TKP) lulusan SLTA/Sekolah Kejuruan Pertanian yang direkrut oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembantu TKP untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional serta tidak menuntut menjadi pegawai negeri Pemda Kabupaten Mamasa dan Kementerian Pertanian RI;

Petugas pendamping mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan khususnya masalah perkakaoan.
- b. Melakukan pembinaan teknis budidaya kepada para petani peserta gerakan.
- c. Melakukan penumbuhan dan pembinaan kelembagaan petani serta mengawal seluruh bantuan sarana produksi Gernas .

- d. Menjembatani fungsi instansi/lembaga yang terkait dengan pembiayaan melalui program revitalisasi dengan perbankan.
- e. Membuat laporan fisik pelaksanaan kegiatan gerakan berdasarkan form sesuai pedum dan jadwal yang telah ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.
- f. TKP berkedudukan di Kantor UPP atau paling jauh 10 km dari Kantor UPP;
- g. Kantor UPP dilengkapi data lapangan kegiatan Gernas antara lain:
 - Peta Wilayah Kerja
 - Monografi
 - Rencana Kerja
- h. PLP-TKP diwilayah kerja masing – masing memiliki Posko dan dilengkapi dengan papan informasi.

7. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara bertahap dan berkelanjutan dengan pelatihan dan pendampingan.

Untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao para petani akan dilatih dan ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan usaha taninya melalui pelatihan teknis budidaya, pasca

panen, peningkatan mutu, kelembagaan, pengelolaan keuangan dan kemitraan usaha.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam program kegiatan pembangunan secara khusus adalah pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu kakao yang menjadi asumsi kuat dalam meningkatkan produksi dan mutu kakao Negara Indonesia. Pelaksanaan Gernas Kakao dimulai sejak tahun 2009 dan berlanjut hingga 2013 melibatkan semua pemangku kepentingan dari pusat hingga petani secara langsung sebagai pelaku di lapangan. Melihat konsep operasionalnya yang tertuang dalam pedoman umum dari pusat hingga petunjuk teknis di tingkat kabupaten, kebijakan pelaksanaan Program Gernas Kakao diyakini mampu memberikan dampak yang signifikan pada penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani. Hal ini tergambar dari keterlibatan petani secara individu dan kelompok dalam program kegiatan dengan berbagai pendampingan dan pembinaan oleh petugas teknis.

8. Manajemen Pelaksanaan

Pelaksanaan gerakan dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Mamasa.

Kelompok sasaran/petani peserta akan mendapat bimbingan teknis dan pengawalan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta petugas UPP.

a. **Organisasi**

Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao disusun organisasi pelaksanaan dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan dengan susunan sebagai berikut :

- (1) Di Tingkat Pusat penanggung jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah Menteri Pertanian RI dengan Pelaksana Harian Gerakan adalah Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Di Tingkat Provinsi Penanggung Jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah Gubernur dengan Pelaksana Harian adalah Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan;
- (3) Di Tingkat Kabupaten/Kota penanggung jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah Bupati/Walikota dengan Pelaksana Harian adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan;

- (4) Di Tingkat Lapangan, pelaksanaan gerakan dikoordinasikan oleh Unit Pelayanan Pembinaan (UPP);
- (5) Di Tingkat kelompok tani, gerakan dilaksanakan oleh petani peserta;

b. Pembinaan dan Koordinasi

Pembinaan dan Koordinasi gerakan dilakukan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Di Tingkat Pusat, Pembinaan dan Koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang dibentuk oleh Menteri Pertanian dan diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
- (2) Di Tingkat Provinsi Pembinaan dan Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur;
- (3) Di Tingkat Kabupaten Pembinaan dan Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang oleh Bupati/Walikota;

(4) Di tingkat lapangan pembinaan dan koordinasi dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pembinaan (UPP).

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat yang dilakukan dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan *website* dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan gerakan.

d. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Kepala UPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setiap bulan;
- (2) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada bupati setiap bulan;

- (3) Bupati menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perkebunan setiap bulan;
- (4) Gubernur menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

D. Tanaman Kakao

Kakao adalah komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman yang merupakan bahan baku cokelat ini dapat berbuah sepanjang tahun. Kakao atau *Theobroma cacao L.*, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cocok dengan kultur tanah dan iklim di Indonesia. Tanaman ini termasuk golongan tumbuhan tropis. Tanaman penghasil biji kakao ini berasal dari daerah hutan tropis di Amerika Selatan. Di habitat asalnya, kakao biasa tumbuh di bagian hutan hujan tropis yang terlindung di bawah pohon-pohon besar. Di Indonesia, kakao banyak tumbuh di daerah Sulawesi, Lampung, dan Flores, Nusa Tenggara Timur. Maklum, di daerah tersebut banyak terdapat lahan tidur yang cocok ditanami kakao (Suaramedia, 2010).

Budidaya tanaman kakao seperti halnya tanaman perkebunan lainnya yang dimulai dengan pembibitan, persiapan lahan tanam, penanaman,

pemeliharaan dan pemberantasan hama dan penyakit. Bahan tanam untuk bibit tanaman kakao dipilih dari klon unggul yang memiliki produksi tinggi dan tahan terhadap penyakit. Klon unggul yang direkomendasikan adalah; Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI-3, ICCRI-4 dan Scavina 6. Persiapan lahan dimulai dengan pembabatan kemudian pengajiran dan pembuatan lobang tanam dan penanaman pohon pelindung. Setelah lahan sudah siap selanjutnya dilakukan penanaman yang dilakukan pada musim penghujan(Dirjenbun, 2009).

Selanjutnya dijelaskan bahwa, pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, pemangkasan (pemangkasan bentuk dan pemangkasan pemeliharaan dan pemangkasan produksi), dan sanitasi. Pemberantasan hama penyakit dilakukan dengan metode PsPSP (Panen sering, Pemangkasan, Sanitasi dan Pemupukan berimbang). Hama utama tanaman kakao adalah PBK (Penggerek Buah Kakao), Kepik Pengisap buah (*Helopeltis Sp*) dan penggerek batang. Hama tersebut sebahagian besar adalah serangga yang senang dengan kondisi kebun yang rimbun dan lembab. Sedangkan penyakit utama tanaman kakao yaitu Busuk Buah, kangker batang dan VSD (vascular streak dieback) yang merupakan jamur perusak tanaman kakao. Dampak dari serangan hama dan penyakit tanaman kakao adalah menurunnya produktivitas tanaman.

Komoditi kakao konsisten sebagai sumber devisa negara yang pada tahun 2006 mencapai US\$ 855 juta. Komoditi kakao juga merupakan sub-

sektor terdepan dalam penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, sektor kakao di Indonesia hampir seluruh produknya digunakan untuk memenuhi pasar ekspor (mencapai 80,64%). Oleh karena itu, sangat penting menghindari penurunan pertumbuhan produksi, karena akan mengakibatkan berkurangnya volume dan nilai ekspor kakao, selanjutnya akan berdampak negatif menurunkan devisa negara (Arsyad dkk., 2011)

Jelang akhir tahun 2011, Indonesia mampu menempati posisi kedua menggeser Ghana dengan peningkatan produksi kakao menjadi 850 ribu ton. Setelah sebelumnya di tahun 2010, Indonesia di peringkat ketiga dengan 550 ribu ton, sementara Pantai Gading menjadi negara pertama penghasil kakao terbesar dunia dengan hasil produksi 1,2 juta ton, dan Ghana diperingkat kedua dengan 650 ribu ton. Dari 850 ribu ton produksi kakao Indonesia, Sulawesi dan Sumatera menyumbang hasil terbesar. Dari Sulawesi produksi terbesar disuplai oleh Sulawesi Barat. Ketertarikan petani berbudidaya tanaman ini sebab harga komoditi tanaman ini relatif stabil. Harga jual kakao saat ini untuk kakao fermentasi bisa mencapai Rp 23 ribu per kilogram. Namun untuk kakao non fermentasi hanya mencapai Rp 20 ribu per kilogram (Wartapedia, 2011).

E. Kerangka Pikir

Kabupaten Mamasa adalah salah satu kabupaten penghasil kakao di Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa kecamatan penghasil kakao di Kabupaten Mamasa tersebar di 7 kecamatan yaitu; Messawa, Pana', Tabang, Rantebulahan Timur, Bambang, Mambi, Aralle dan Tabulahan. Di Kecamatan Messawa Kakao menjadi tanaman yang banyak diusahakan oleh petani selain tanaman kopi. Tanaman kakao sangat digemari oleh petani karena pembudidayaannya relatif lebih mudah dari tanaman perkebunan lainnya. Sejak beberapa tahun terakhir ini produktivitas tanaman petani di Kecamatan Messawa mengalami penurunan yang sangat besar dari rata-rata 700 kg/ha/tahun kini hanya 540 kg/ha/tahun. Hal ini terjadi akibat tingginya serangan hama/penyakit tanaman kakao serta pola budidaya yang tidak benar. Sehingga diperlukan suatu program besar untuk mengatasinya sebab hal ini juga di rasakan petani kakao di daerah lain.

Gernas Kakao adalah suatu program yang sangat baik untuk mengembalikan produktivitas kakao Indonesia. Program Gernas Kakao tidak hanya dipokuskan pada sistem budidaya tanaman tetapi juga pada pendampingan kelompok tani dan petani kakao dalam bentuk pelatihan dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Hal ini sangat baik agar petani kakao secara pribadi mampu melakukan pola dan teknik budidaya tanaman serta memungkinkan petani secara kelembagaan meningkatkan kerangka kerja

sama dan memperoleh akses permodalan usaha secara bersama-sama dalam sebuah organisasinya.

Kegiatan gernas kakao ditujukan untuk petani kakao yang tergabung dalam sebuah kelompok tani kakao. Sehingga petani penerima manfaat bantuan ini hanya yang masuk salah satu kelompok di wilayahnya. Persyaratan lainnya adalah sanggup melaksanakan kegiatan sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis Gernas kakao, kondisi tanamannya layak untuk diremajakan atau direhabilitasi serta diintensifikasi. Persyaratan ini jika kita analisa akan membawahkan dampak yang baik bagi peningkatan produksi sebagai tujuan utama kegiatan dan perbaikan kelembagaan kelompok tani yang mengikuti kegiatan Gernas Kakao ini (Anonim, 2009).

Sejak tahun 2010 Kecamatan Messawa mendapatkan alokasi kegiatan Gernas kakao. Kehadiran program nasional ini memberikan harapan bagi perbaikan kehidupan petani dan kemajuan kelompok-kelompok tani. Salah satu faktor yang menjadi pendukung harapan tersebut adalah adanya program kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok tani tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petani dan kemampuan mengembangkan kelompok taninya untuk perbaikan kehidupannya dan kelompoknya.

Kondisi kelembagaan kelompok tani yang ada di daerah terpencil seperti Mamasa masih sangat membutuhkan penguatan dan pendampingan yang maksimal. Kelompok tani yang ada belum mapu berkembang secara

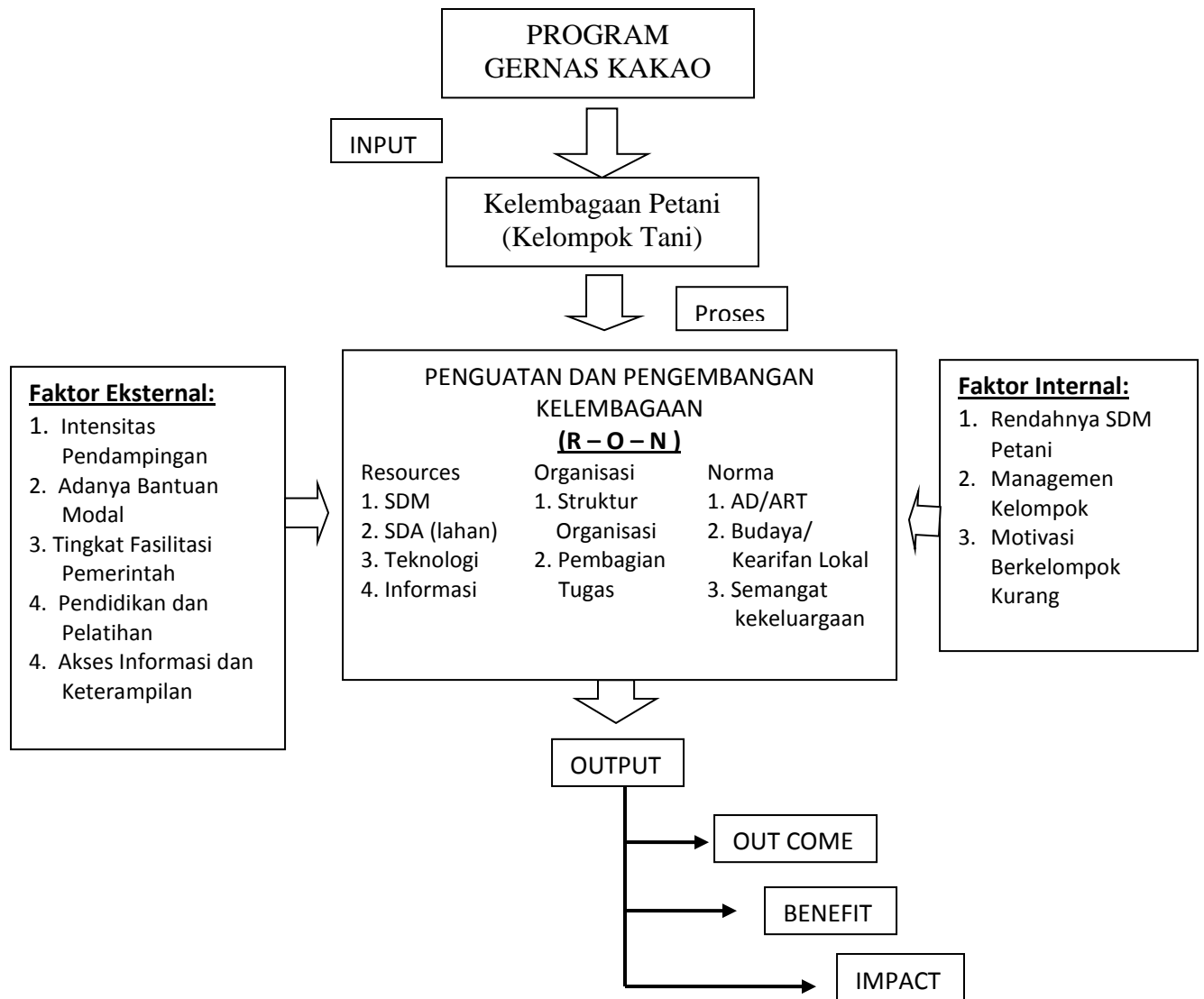
sendiri-sendiri tanpa bantuan dan kehadiran pemerintah dalam bentuk program di lapangan. Seperti halnya di Kecamatan Messawa kelompok-kelompok tani yang ada hanya dalam bentuk sebuah organisasi dengan struktur pengurus tanpa ada aturan baku dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Aturan yang menjadi dasar berkelompok adalah budaya setempat yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dalam bekerja. Selain itu kedekatan hubungan kekerabatan menjadi kekuatan dalam menjaga kelangsungan dan keberadaan kelompok-kelompok tani yang ada.

Kelembagaan petani akan bisa berkembang dengan baik jika didukung dengan adanya penguatan kelembagaan dan pola pendampingan secara optimal. Selain itu tentunya adanya kesadaran sendiri dari setiap petani secara perorangan untuk bergabung dalam sebuah kelompok tani untuk kepentingan bersama. Program pemerintah diharapkan mengacu pada pembangunan pertanian secara menyeluruh baik terhadap objek usaha tani maupun pada pribadi petani dan kelembagaan kelompok-kelompok tani itu sendiri sebagai pelaku usaha tani. Hal ini penting sebab optimalisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan pertanian bergantung pada peran dan keterlibatan petani dan lembaga-lembaga pertanian terutama kelompok-kelompok tani sebagai ujung tombak pelaksana program kegiatan di lapangan.

Sebuah kelembagaan (keorganisasian) sebagai media berarti mengintroduksi sebuah organisasi, atau struktur sosial baru. Dalam proses

ini akan terjadi restrukturisasi yaitu perubahan dan pergantian struktur sosial lama menjadi struktur sosial yang baru. Struktur baru yang akan diintroduksi tersebut tentu memiliki nilai-nilai dan kaidah-kaidah baru didalamnya karena setiap struktur baru selalu dijiwai oleh nilai dan kaidah-kaidah yang baru. Dan merujuk pada pendapat Uphoff (1986), suatu organisasi baru dimulai dengan perubahan peran, untuk selanjutnya diikuti dengan perubahan nilai-nilai baru. Pada langkah awal yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah belum adanya institusi, selanjutnya menjadi organisasi yang didalamnya hidup institusi atau organisasi yang melembaga. Perubahan sosial biasanya dibarengi dengan proses pergantian, sementara pada tataran masyarakat kita yang hidup sekian lama ada kecenderungan menjaga dan mengembangkan struktur sosial dan kompleks nilai yang ada secara stabil.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini terlihat dalam gambar 1 berikut :



Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir Penelitian